



A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	1.183.503.012.670,00	1.179.674.498.386,82	99,68	1.192.716.072.755,61
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	164.543.272.728,00	166.023.316.040,82	100,90	129.221.846.896,99
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	130.160.400.000,00	131.625.816.659,65	101,13	97.929.455.647,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.910.000.000,00	3.609.657.746,65	92,32	2.218.395.023,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.432.369.567,00	2.001.255.642,00	82,28	819.924.969,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	28.040.503.161,00	28.786.585.992,52	102,66	28.254.071.257,49
7					
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	968.356.939.942,00	956.705.207.759,00	98,80	994.632.022.418,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	732.443.424.638,00	724.768.437.219,00	98,95	800.268.552.172,00
10	Bagi Hasil Pajak - LRA	26.409.427.356,00	20.538.803.166,00	77,77	23.208.847.791,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	3.781.956.299,00	2.752.740.598,00	72,79	3.602.367.544,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	568.210.636.000,00	565.927.402.000,00	99,60	628.895.139.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	134.041.404.983,00	135.549.491.455,00	101,13	144.562.197.837,00
14					
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya - LRA	182.046.687.200,00	183.065.249.000,00	100,56	118.843.171.000,00
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182.046.687.200,00	183.065.249.000,00	100,56	118.843.171.000,00
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	53.866.828.104,00	48.871.521.540,00	90,73	75.520.299.246,00
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	53.866.828.104,00	48.871.521.540,00	90,73	75.520.299.246,00
19	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	50.602.800.000,00	56.945.974.587,00	112,54	68.862.203.440,62
23	Pendapatan Hibah - LRA	50.602.800.000,00	56.831.600.000,00	112,31	64.836.163.000,00
24	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	114.374.587,00	0,00	4.026.040.440,62
25					
26	BELANJA	1.131.251.218.170,00	1.010.634.841.463,20	89,34	1.011.328.702.368,57
27	BELANJA OPERASI	780.649.945.828,67	728.394.781.023,20	93,31	787.915.844.332,57
28	Belanja Pegawai	471.666.532.512,00	435.848.783.421,00	92,41	460.237.820.585,00
29	Belanja Barang dan Jasa	278.721.320.566,67	266.420.971.143,20	95,59	306.500.073.747,57
30	Belanja Bunga	1.800.000.000,00	146.034.209,00	8,11	0,00
31	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Hibah	19.900.092.750,00	18.738.192.250,00	94,16	17.515.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	Realisasi 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
33	Belanja Bantuan Sosial	8.562.000.000,00	7.240.800.000,00	84,57	3.662.000.000,00
34					
35	BELANJA MODAL	277.825.301.878,33	208.230.711.434,00	74,95	222.600.369.777,00
36	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	198.796.000,00	99,40	608.709.152,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.057.416.782,64	52.218.754.193,00	100,31	60.018.424.718,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.036.107.551,06	16.316.053.911,00	95,77	21.703.988.784,00
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.045.036.102,00	132.304.065.540,00	66,81	126.424.999.574,00
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.486.741.442,63	7.193.041.790,00	68,59	13.844.247.549,00
41					
42	BELANJA TAK TERDUGA	72.775.970.463,00	74.009.349.006,00	101,69	812.488.259,00
43	Belanja Tak Terduga	72.775.970.463,00	74.009.349.006,00	101,69	812.488.259,00
44					
45	TRANSFER	200.562.545.151,00	200.491.253.145,00	99,96	186.504.096.565,00
46	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	18.149.896.035,00	18.149.896.034,00	100,00	0,00
47	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	18.149.896.035,00	18.149.896.034,00	100,00	0,00
48					
49	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	182.412.649.116,00	182.341.357.111,00	99,96	186.504.096.565,00
50	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	181.612.520.166,00	181.541.228.166,00	99,96	185.754.771.400,00
51	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	800.128.950,00	800.128.945,00	100,00	749.325.165,00
52					
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.331.813.763.321,00	1.211.126.094.608,20	90,94	1.197.832.798.933,57
54	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.310.750.651,00)	(31.451.596.221,38)	21,21	(5.116.726.177,96)
55					
56	PEMBIAYAAN				
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	206.052.298.888,00	146.483.314.041,99	71,09	142.553.261.378,95
58	Penggunaan SiLPA	127.114.888.888,00	127.114.888.887,99	100,00	142.553.261.378,95
59	Pinjaman Dalam Negeri	78.937.410.000,00	19.368.425.154,00	24,54	0,00
60					
61	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.741.548.237,00	5.741.548.237,00	9,94	10.321.646.313,00
62	Pembentukan Dana Cadangan	52.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.741.548.237,00	5.741.548.237,00	100,00	10.321.646.313,00
64	PEMBIAYAAN NETTO	148.310.750.651,00	140.741.765.804,99	94,90	132.231.615.065,95
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	109.290.169.583,61	0,00	127.114.888.887,99

BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, M.AP
8



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 11 Mei 2021

Nomor : 250.b/S/XVIII.MDN/05/2021
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
Tahun Anggaran (TA) 2020

Yth. Bupati Batu Bara

Di

Lima Puluh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara TA 2020 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Batu Bara dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Batu Bara TA 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Empat OPD Sebesar Rp87.553.000,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak pada 25 OPD Sebesar Rp148.227.337,50; dan
- c. Pelaksanaan 22 Paket Pekerjaan pada Empat OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.904.243.907,94.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batu Bara, diantaranya:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan;
 - 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada 17 Penyedia Barang Jasa sebesar Rp1.453.690.376,25;

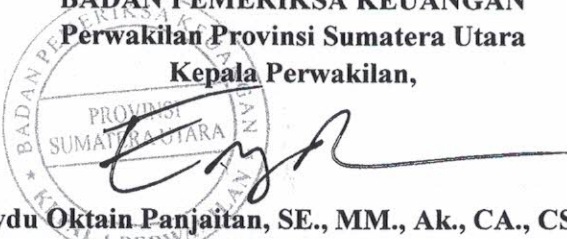
- 3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebih cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan; dan
 - 4) PPTK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
2. Kepala Dinas Perhubungan:
- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan serta menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp111.381.457,77 dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - 2) PPHP lebih cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan; dan
 - 3) PPTK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan serta menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp97.423.608,13 dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - 2) PPHP lebih cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan; dan
 - 3) PPTK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
4. Kepala Dinas Perikanan:
- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan serta menagih kelebihan pembayaran kepada CV. UK dan CV. HM sebesar Rp241.748.465,79 dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - 2) PPHP lebih cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan; dan
 - 3) PPTK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021, bertanggal 10 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Batu Bara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, SE., MM., Ak., CA., CSFA
NIP. 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Batu Bara